
Upaya Mediasi Tiongkok Dalam Penyelesaian Konflik Internal Afghanistan Tahun 2016-2021

Dhy'van Yusuf Madjid¹, Uni. W. Sagena²

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia (ivansyusuf170800@gmail.com)

²Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Indonesia

ABSTRACT

This study analyzes China's role and mediation strategies in resolving Afghanistan's internal conflict during the 2016–2021 period, emphasizing the national interests underlying its involvement. Using a qualitative explanatory method and secondary data drawn from academic literature, official reports, and policy documents, the research employs the Miles and Huberman interactive model, encompassing data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing.

The findings reveal that China's engagement was driven by three primary dimensions of national interest: economic, security, and political. Through the Belt and Road Initiative (BRI), China sought to strengthen economic cooperation and secure strategic investments in Afghanistan while preventing the spread of extremism that could threaten regional stability, particularly in Xinjiang. In its diplomatic approach, China positioned itself as a neutral mediator through developmental diplomacy, engaging in peacemaking, peacekeeping, and peacebuilding stages aimed not only at conflict resolution but also at fostering long-term stability and expanding its geopolitical influence in Central Asia.

Keywords: Belt and Road Initiative, Conflict Resolution, Diplomacy, National Interest

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran dan strategi mediasi Tiongkok dalam penyelesaian konflik internal Afghanistan pada periode 2016–2021 dengan menyoroti kepentingan nasional yang melatarbelakanginya. Menggunakan metode kualitatif eksplanatif dan data sekunder dari literatur akademik, laporan resmi, serta dokumen kebijakan, penelitian ini dianalisis melalui model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tahap pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Tiongkok didorong oleh tiga kepentingan utama, yaitu ekonomi, keamanan, dan politik. Melalui inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI), Tiongkok berupaya memperkuat kerja sama ekonomi dan mengamankan investasi strategis di Afghanistan, sekaligus mencegah penyebaran ekstremisme yang berpotensi mengancam stabilitas kawasan, khususnya di Xinjiang. Dalam konteks diplomasi, Tiongkok menampilkan diri sebagai mediator netral dengan pendekatan *developmental diplomacy*

.....
melalui tahapan *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*, yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada penciptaan stabilitas jangka panjang dan perluasan pengaruh geopolitik di Asia Tengah.

Kata Kunci: Belt and Road Initiative, Resolusi Konflik, Diplomasi, Kepentingan Nasional

INTRODUCTION

Afghanistan merupakan negara yang terletak di kawasan perbatasan antara Asia Tengah dan Asia Selatan. Selama berabad-abad, negara ini menghadapi berbagai bentuk konflik dan ketidakstabilan politik, ekonomi, sosial, serta keamanan. Sejak abad ke-16 hingga abad ke-21, Afghanistan terus dilanda perang dan perebutan kekuasaan, baik antar-suku di dalam negeri maupun dengan kekuatan asing seperti Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Inggris selama Perang Dunia Kedua (Katzman, 2010).

Secara geografis, Afghanistan memiliki posisi strategis karena terletak di antara tiga pegunungan tertinggi di dunia, yaitu Korakorum, Hindu Kush, dan Himalaya. Pegunungan Hindu Kush membagi wilayah Afghanistan menjadi tiga kawasan utama: Dataran Utara, Dataran Tinggi Sentral, dan Dataran Tinggi Barat Daya. Dataran Tinggi Sentral merupakan bagian dari sistem pegunungan Himalaya yang memiliki lembah-lembah di ketinggian sekitar 4.500 meter di atas permukaan laut, menjadikannya medan strategis dalam berbagai konflik militer (Hadibroto et al., 2002). Afghanistan memiliki luas wilayah 652.225 km² dengan jumlah penduduk sekitar 42,6 juta jiwa pada pertengahan tahun 2024. Negara ini berbatasan dengan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan di utara; Pakistan di selatan dan timur; serta Iran di barat (Syarifuddin, 2016).

Walaupun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti tembaga, emas, batu bara, minyak bumi, dan timah, Afghanistan gagal memanfaatkannya secara optimal karena konflik berkepanjangan.

Ironisnya, negara ini menjadi produsen opium terbesar di dunia dengan kontribusi mencapai 85% dari total produksi global (Pambudi, 2022).

Salah satu faktor utama ketidakstabilan Afghanistan adalah konflik antara pemerintah dan kelompok Taliban. Taliban, yang muncul pada tahun 1994 sebagai gerakan Mujahidin Islam, berhasil menguasai pemerintahan Afghanistan pada periode 1996–2001. Pada awal kemunculannya, kelompok ini tidak banyak mendapat perhatian dari pengamat Barat, namun sorotan dunia meningkat setelah serangan 11 September 2001 (Al-Ghiffari, 2013).

Menjelang akhir 1990-an, Taliban telah menguasai empat dari lima kota utama di Afghanistan—Kabul, Kandahar, Herat, dan Jalalabad—serta sekitar 90% wilayah negara (Maley, 1999; Hadibroto et al., 2002). Akibatnya, pemerintahan Afghanistan kehilangan kendali terhadap keamanan dalam negeri, yang memunculkan kekacauan dan berbagai tindak kriminal seperti perampokan dan kekerasan. Pemberontakan Taliban berujung pada pengambilalihan kekuasaan dan penerapan sistem hukum Islam berbasis syariat.

Pasca runtuhnya rezim Taliban pada tahun 2002, muncul generasi baru atau *generasi kedua Taliban* yang lebih beragam secara etnis dan politik. Generasi ini memperluas strategi perjuangan, tidak hanya mengandalkan kekuatan militer tetapi juga pendekatan politik, ekonomi, sosial, dan diplomasi, termasuk perundingan dengan Amerika Serikat (Argenti, 2019).

Dalam konteks hubungan

internasional, Afghanistan memiliki relasi yang relatif harmonis dengan Tiongkok. Salah satu faktor pendukungnya adalah sikap Tiongkok yang tidak mencampuri urusan politik dalam negeri Afghanistan maupun konflik teritorialnya (Hong, 2013). Hubungan bilateral ini semakin diperkuat sejak kunjungan Presiden Karzai ke Beijing pada tahun 2010, ketika kedua negara sepakat membangun kemitraan yang berlandaskan kepercayaan dan saling menghormati (Ng, 2010).

Tiongkok juga aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada Afghanistan. Pada tahun 2001, Tiongkok menyalurkan bantuan senilai 4 juta USD, dan hingga 2013 total bantuan mencapai 250 juta USD, termasuk pelatihan bagi 300 personel keamanan Afghanistan (Korski, 2008). Sejak 2006, Tiongkok memberikan pembebasan pajak terhadap 278 jenis barang impor dari Afghanistan, dan pada 2012 kedua negara sepakat memperkuat hubungan strategis (Chene, 2014).

Selain dengan pemerintah Afghanistan, Tiongkok juga menjalin komunikasi langsung dengan Taliban. Pada tahun 2014, perwakilan Taliban melakukan kunjungan resmi ke Tiongkok, yang menandai dimulainya hubungan diplomatik tidak langsung antara keduanya (Tiezzi, 2015). Langkah ini diikuti dengan kerja sama trilateral antara Tiongkok, Pakistan, dan Rusia pada tahun 2016 untuk mendukung proses perdamaian di Afghanistan melalui penghapusan sejumlah sanksi terhadap tokoh Taliban (Khalil, 2017).

Upaya perdamaian antara Taliban dan pemerintah Afghanistan juga dilakukan melalui forum *Quadrilateral Coordination Group* (QCG) yang dibentuk dalam *The Heart of Asia Conference* di Islamabad pada 9 September 2015. Forum ini melibatkan Tiongkok, Pakistan, Amerika Serikat, dan Afghanistan sebagai fasilitator rekonsiliasi politik (Chiu & Ferrie, 2016; Desk, 2016). Selain itu, Tiongkok juga berpartisipasi dalam *Shanghai Cooperation Group* bersama Rusia, Tajikistan, Kirgizstan, dan Uzbekistan untuk mendukung stabilitas

regional (Raiszadal, 2015).

Konflik berkepanjangan antara Taliban dan pemerintah Afghanistan memunculkan kekhawatiran bagi Tiongkok terkait penyebaran pengaruh radikal ke wilayah Xinjiang. Tiongkok memandang kelompok separatis seperti *East Turkistan Islamic Movement (ETIM)* sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional (Ahrari, 2000). Di sisi lain, kepentingan ekonomi Tiongkok di Afghanistan cukup besar, seperti investasi tambang tembaga Mes Aynak senilai 3,4 miliar USD (Gartenstein-Ross et al., 2014). Namun, proyek ini terhenti akibat kondisi keamanan yang tidak stabil (Hasrat & Nazimi, 2016).

Kestabilan politik dan keamanan di Afghanistan memiliki nilai strategis bagi Tiongkok, baik untuk menjaga keamanan regional maupun memperluas kepentingan ekonominya. Potensi sumber daya alam Afghanistan yang bernilai sekitar 100 miliar USD menjadi salah satu daya tarik utama bagi investasi asing (Piven, 2015).

Setelah Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, isu keamanan dan politik Afghanistan kembali menjadi perhatian global. Tiongkok menjadi negara pertama yang secara de facto mengakui pemerintahan Taliban dan menyatakan dukungannya terhadap stabilitas politik di Afghanistan (Anugerah & Purba, 2021; Zaki, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, Tiongkok memiliki kepentingan nasional yang kuat dalam mendorong perdamaian di Afghanistan, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun keamanan kawasan.

LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai kepentingan ekonomi dan strategis Tiongkok di Afghanistan telah banyak dibahas oleh berbagai peneliti, terutama dalam konteks hubungan bilateral dan dinamika keamanan kawasan pasca intervensi Amerika Serikat. Salah satu penelitian awal dilakukan oleh Raja Muhammad Khan (2015) dalam artikelnya berjudul *China's Economic and Strategic Interest in Afghanistan* yang diterbitkan di

FWU Journal of Social Sciences. Khan menyoroti sejarah hubungan baik antara Tiongkok dan Afghanistan yang relatif bebas dari konflik perbatasan, ideologi, maupun politik. Menurutnya, hubungan tersebut didorong oleh kepentingan ekonomi yang kuat, khususnya dalam sektor sumber daya alam. Khan mencatat bahwa Afghanistan memiliki cadangan mineral yang besar, yang menjadi daya tarik utama bagi investasi Tiongkok. Ia mencontohkan investasi sebesar 3,5 miliar USD oleh perusahaan Tiongkok pada proyek tambang tembaga Aynak pada tahun 2007, serta inisiatif eksplorasi minyak yang menjadi tonggak awal kerja sama energi kedua negara.

Selain aspek ekonomi, Khan juga menyoroti dimensi strategis melalui keterlibatan Tiongkok dalam *Shanghai Cooperation Organization (SCO)* sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas kawasan dan mencegah meluasnya konflik Afghanistan ke negara-negara tetangga. Meskipun demikian, studi Khan masih terbatas pada dimensi ekonomi dan keamanan umum, tanpa membahas keterlibatan langsung Taliban sebagai aktor penting dalam dinamika hubungan Tiongkok–Afghanistan.

Kajian lain yang lebih menyoroti aspek politik dan diplomasi dilakukan oleh Rustam Ali Seerat (2015) dalam jurnal *China's Role in Afghan-Taliban Peace Talks: Afghan Perspectives*. Seerat menilai bahwa Tiongkok memiliki kapasitas diplomatik untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi antara pemerintah Afghanistan dan Taliban melalui pengaruhnya di SCO. Ia menekankan bahwa kepentingan utama Tiongkok dalam keterlibatan tersebut adalah menjaga stabilitas di kawasan perbatasannya, khususnya di Provinsi Xinjiang, yang dianggap rentan terhadap pengaruh ekstremisme lintas batas. Seerat juga menyoroti penerimaan positif dari sejumlah aktor internasional terhadap peran mediasi Tiongkok, meskipun kajiannya belum menggali secara mendalam dimensi ekonomi dalam strategi Tiongkok di Afghanistan.

Sementara itu, Daveed Gartenstein-

Ross, Daniel Trombly, dan Nathaniel Barr (2014) dalam laporan mereka berjudul *China's Post-2014 Role in Afghanistan* memberikan analisis komprehensif mengenai kepentingan ganda Tiongkok—ekonomi dan keamanan—di Afghanistan pasca penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO. Mereka berargumen bahwa Tiongkok berupaya mempertahankan stabilitas demi melindungi investasi dan proyek-proyek ekonominya melalui hubungan pragmatis, termasuk dengan aktor non-negara bersenjata (VNSAs) maupun Taliban. Namun demikian, laporan tersebut menegaskan bahwa Tiongkok tidak berniat mengisi kekosongan kekuasaan di Afghanistan secara politik atau militer. Fokus utama Beijing justru berada pada pendekatan ekonomi melalui *state-owned enterprises (SOEs)* yang bersifat oportunistik: berinvestasi tanpa mempertimbangkan kondisi stabilitas politik negara tuan rumah, namun tetap mengambil langkah-langkah untuk mengamankan aset mereka.

Selain itu, Gartenstein-Ross dan koleganya juga menyoroti kekhawatiran keamanan domestik Tiongkok, khususnya ancaman kelompok separatis seperti East Turkistan Islamic Movement (ETIM) yang berpotensi memanfaatkan ketidakstabilan Afghanistan sebagai basis operasi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Afghanistan merupakan kombinasi antara kepentingan ekonomi, keamanan regional, dan stabilitas domestik.

Ketiga literatur tersebut menunjukkan bahwa pendekatan Tiongkok terhadap Afghanistan bersifat pragmatis dan multidimensi, melibatkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan. Khan (2015) menekankan dimensi ekonomi dan historis hubungan bilateral; Seerat (2015) menyoroti peran diplomatik Tiongkok dalam proses perdamaian; sedangkan Gartenstein-Ross et al. (2014) mengaitkan keduanya dalam konteks geopolitik pasca-2014. Namun, celah penelitian masih terdapat pada analisis

mengenai **peran mediasi Tiongkok dalam penyelesaian konflik internal Afghanistan**, khususnya pada periode **2016–2021**, ketika dinamika hubungan Beijing dengan Taliban semakin menonjol. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi kekosongan tersebut dengan menelaah bagaimana Tiongkok memainkan peran sebagai mediator dalam konflik Afghanistan dengan tetap mempertahankan orientasi pragmatis terhadap keamanan dan ekonomi.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif, yakni pendekatan yang bertujuan menjelaskan fenomena berdasarkan pertanyaan “bagaimana” dengan menyampaikan fakta dan hubungan kausal antarvariabel (Library, 2020). Pendekatan ini relevan untuk memahami **bagaimana Tiongkok berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik internal Afghanistan pada periode 2016–2021**, serta faktor-faktor yang memengaruhi strategi diplomasi dan kepentingan nasionalnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui kajian literatur dan dokumentasi. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel berita, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan peran Tiongkok dalam mediasi konflik Afghanistan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menelaah hubungan antarvariabel seperti kepentingan ekonomi, stabilitas keamanan, serta kebijakan luar negeri Tiongkok. Melalui metode ini, peneliti berupaya menjelaskan pola, motivasi, dan implikasi dari peran mediasi Tiongkok dalam konteks geopolitik Asia Tengah.

THEORETICAL FRAMEWORK: KEPENTINGAN NASIONAL DAN RESOLUSI KONFLIK DALAM KONTEKS MEDIASI TIONGKOK DI AFGHANISTAN

Menurut pandangan **neorealisme**, negara merupakan aktor rasional yang berupaya mempertahankan eksistensinya dalam sistem internasional yang anarkis. Kenneth Waltz (1979) menegaskan bahwa kepentingan nasional berakar pada dorongan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, baik melalui paksaan maupun kerja sama. Dalam kerangka ini, kekuasaan dipahami sebagai alat dan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup negara.

Selaras dengan pandangan tersebut, K.J. Holsti (1967) mengklasifikasikan kepentingan nasional berdasarkan tingkat urgensi dan jangka waktu pencapaiannya menjadi tiga kategori utama. Pertama, kepentingan inti (*core interests*), yaitu kepentingan vital yang menyangkut kelangsungan hidup negara, seperti keamanan teritorial, kedaulatan politik, dan keselamatan warga negara. Kedua, kepentingan jangka menengah (*middle-range interests*), yang mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi, stabilitas sosial, dan penguatan posisi diplomatik di kancah global. Ketiga, kepentingan jangka panjang (*long-range interests*), yang bersifat ideologis dan visioner, mencerminkan aspirasi negara untuk membentuk tatanan dunia sesuai nilai dan prinsip yang dianut.

Kerangka konseptual ini menjadi landasan dalam memahami kebijakan dan perilaku luar negeri Tiongkok di Afghanistan, di mana kepentingan keamanan dan ekonomi menempati posisi utama, sedangkan aktivitas diplomatik dan politik berfungsi sebagai instrumen jangka panjang untuk menjaga stabilitas regional serta memperluas pengaruh Tiongkok dalam tatanan internasional.

Dalam konteks penyelesaian konflik Afghanistan, penelitian ini menggunakan teori resolusi konflik sebagaimana dikemukakan oleh Nicholson (1991) dan Johan Galtung. Nicholson mendefinisikan resolusi konflik sebagai proses di mana para aktor berhenti melanjutkan konfrontasi karena telah tercipta distribusi keuntungan

yang dapat diterima semua pihak. Sementara itu, Galtung membagi proses penyelesaian konflik ke dalam tiga tahapan utama, yakni *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding* (Izzuddin et al., 2022).

Peacemaking, mewujudkan perdamaian dengan upaya negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Metode *peacemaking* dapat ditempuh dengan cara antara lain; *coercive* yakni, menetapkan kebijakan intervensi sebagai upaya kendali terhadap konflik yang menyebabkan pemaksaan secara fisik; litigasi, yakni resolusi konflik dengan mengutamakan jalur hukum; dan non-litigasi, yakni penyelesaian konflik lewat lembaga non peradilan atau melalui mediasi, negosiasi, dan arbitrase. *Peacekeeping*, tahapan menjaga keamanan untuk menghindari konflik secara terbuka atau menghindari terjadinya konflik secara kekerasan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan *peacebuilding* membangun kembali komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik agar kondisi kembali pada keadaan destruktif. Pada proses *peacebuilding*, akan terbentuk landasan baru yang orientasinya bersifat jangka panjang. (Izzuddin et al., 2022).

Melalui kerangka ini, strategi mediasi Tiongkok dapat dianalisis tidak hanya sebagai upaya diplomatik semata, tetapi juga sebagai bagian dari pendekatan sistematis dalam menciptakan stabilitas jangka panjang. *Peacemaking* diwujudkan melalui fasilitasi dialog antar pihak berkonflik; *peacekeeping* dilakukan lewat kerja sama keamanan regional; sedangkan *peacebuilding* terwujud melalui investasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang mendukung rekonstruksi sosial-ekonomi Afghanistan.

RESULT AND ANALYSIS

UPAYA MEDIASI TIONGKOK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL AFGHANISTAN TAHUN 2016-2021

Hubungan antara Tiongkok dan Afghanistan telah terjalin selama berabad-abad, berakar dari posisi strategis Afghanistan sebagai koridor penting di Jalur Sutra kuno. Rute perdagangan ini tidak hanya memfasilitasi pertukaran barang berharga seperti sutra, teh, dan porselen, tetapi juga menjadi saluran pertukaran ide, teknologi, dan kebudayaan. Warisan konektivitas tersebut kemudian dihidupkan kembali oleh Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diluncurkan pada tahun 2013. Dalam kerangka BRI, Afghanistan dipandang memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai “jembatan darat” yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Selatan dan Timur Tengah. Potensi integrasi Afghanistan dalam *China–Pakistan Economic Corridor* (CPEC) diyakini dapat memperluas jaringan infrastruktur dan perdagangan regional, membuka akses ke pasar global, sekaligus memberikan Tiongkok rute alternatif menuju Samudra Hindia.

PERAN TIONGKOK DALAM RESOLUSI KONFLIK AFGHANISTAN

Peran Tiongkok dalam resolusi konflik di Afghanistan mengalami perkembangan signifikan seiring meningkatnya pengaruh dan kepentingannya di kawasan tersebut. Berbeda dengan kekuatan global lainnya yang mengedepankan intervensi militer, Tiongkok memilih jalur diplomasi dan mediasi. Pendekatan ini memungkinkan Beijing untuk melindungi kepentingannya tanpa harus terlibat langsung dalam konflik yang berpotensi panjang dan mahal. Strategi ini sejalan dengan konsep resolusi konflik yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, kompromi, dan dialog.

Dalam kerangka teori resolusi konflik Galtung dan Nicholson, strategi Tiongkok mencakup tahapan *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*. Pada tahap *peacemaking*, Tiongkok berperan sebagai fasilitator dialog antara pihak-pihak

yang bertikai. Sejak tahun 1998, Beijing telah menjalin komunikasi dengan rezim Taliban pertama untuk memperoleh jaminan keamanan. Selama periode pasca-2001, Tiongkok secara hati-hati mempertahankan jalur komunikasi dengan Taliban meskipun kelompok tersebut tengah berkonfrontasi dengan pasukan internasional. Puncaknya terjadi pada Juli 2021, ketika Tiongkok menjadi tuan rumah bagi delegasi Taliban di Tianjin, menandai pengakuan diplomatik de facto terhadap kelompok tersebut. Pertemuan ini menunjukkan kesiapan Tiongkok bekerja sama dengan otoritas manapun yang mampu menjaga stabilitas dan menghormati kepentingan keamanannya.

Setelah Taliban kembali berkuasa, peran *peacemaking* Tiongkok semakin menonjol melalui dorongan agar pemerintahan baru membentuk struktur inklusif, menghormati hak-hak perempuan, dan memutus hubungan dengan kelompok teroris seperti *East Turkestan Islamic Movement* (ETIM). Pada tahap *peacebuilding*, Tiongkok berupaya mengatasi akar penyebab konflik melalui pembangunan ekonomi. Beijing meyakini bahwa stabilitas politik tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, komitmen Tiongkok terhadap investasi infrastruktur, pertambangan, dan energi menjadi bagian integral dari strategi *peacebuilding*. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, memperbaiki infrastruktur dasar, dan mengurangi ketimpangan sosial yang menjadi pemicu konflik. Selain itu, Tiongkok juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa pangan dan pasokan medis pasca-2021, yang berfungsi sebagai instrumen diplomasi kepercayaan (*trust-building diplomacy*).

DIPLOMASI MULTILATERAL DAN MEKANISME REGIONAL

Selain jalur bilateral, Tiongkok juga aktif menggunakan platform multilateral untuk memperkuat perannya dalam perdamaian Afghanistan. Salah satu inisiatif penting adalah *Meeting of Foreign Ministers of Afghanistan's Neighboring Countries*, yang melibatkan Tiongkok, Pakistan, Iran, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi kebijakan antarnegara yang terdampak langsung oleh instabilitas Afghanistan. Melalui mekanisme ini, Tiongkok mendorong terciptanya konsensus regional dan pendekatan bersama terhadap pemerintahan Taliban, serta memastikan komitmen mereka terhadap keamanan regional.

Upaya multilateral tersebut juga diwujudkan dalam berbagai forum di bawah *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), seperti:

1. Pembentukan SCO–Afghanistan Contact Group (2005)

Tiongkok berperan aktif dalam membentuk kelompok ini sebagai wadah komunikasi dan koordinasi isu keamanan, termasuk terorisme lintas batas dan kejahatan transnasional.

Pembentukan kelompok ini menunjukkan langkah awal SCO dalam menjadikan isu Afghanistan sebagai bagian integral dari kebijakan keamanan kawasan. Mengingat posisi geografis Afghanistan yang strategis, keberlanjutan stabilitas negara ini menjadi kepentingan bersama negara-negara di kawasan Asia Tengah dan sekitarnya, termasuk Tiongkok. Dalam forum ini, Tiongkok mendorong pendekatan non-militer, berfokus pada penguatan kapasitas negara, pembangunan ekonomi, dan keterlibatan diplomatik.

2. Konferensi Spesial di Moskow (2009)

Pada 27 Maret 2009, sebuah konferensi penting bertajuk *Special Conference on Afghanistan* diadakan di Moskow di bawah payung SCO. Konferensi ini merupakan salah satu langkah besar yang

melibatkan berbagai aktor internasional untuk membahas masa depan Afghanistan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-moon, hadir dan menyampaikan pidato yang menggarisbawahi pentingnya kerja sama regional dalam menjamin masa depan damai dan stabil bagi Afghanistan.

Tiongkok, sebagai negara anggota SCO, turut serta dalam konferensi tersebut. Kehadiran pejabat tinggi Tiongkok dalam forum ini mempertegas posisinya sebagai pihak yang berkomitmen mendukung solusi damai di Afghanistan. Selain memperkuat legitimasi SCO sebagai platform diplomatik.

Forum ini memperkuat legitimasi SCO sebagai platform diplomatik regional dan menegaskan komitmen Tiongkok terhadap solusi damai di Afghanistan.

3. **Pemberian Status Pengamat kepada Afghanistan (2012)**

Pada 7 Juni 2012, dalam KTT SCO yang diadakan di Beijing, Afghanistan secara resmi diberikan status sebagai negara pengamat. Status ini membuka peluang lebih besar bagi Afghanistan untuk terlibat dalam diskusi strategis, pertukaran informasi, serta kerja sama praktis dengan negara-negara anggota SCO, terutama Tiongkok dan Rusia.

Status ini membuka peluang Afghanistan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan dan stabilisasi kawasan. Sementara, bagi Tiongkok, keanggotaan Afghanistan sebagai pengamat merupakan bagian dari strategi membina stabilitas jangka panjang di wilayah perbatasannya, terutama mengingat kekhawatiran Beijing terhadap kemungkinan infiltrasi ideologi radikal ke wilayah Xinjiang melalui rute Afghanistan.

4. **Reaktivasi SCO–Afghanistan Contact Group (2017–2019)**

Tiongkok menegaskan pentingnya kerja sama ekonomi dan keamanan perbatasan serta mendukung proses perdamaian inklusif yang dipimpin oleh Afghanistan sendiri, meskipun sempat tidak aktif selama hampir delapan tahun, *SCO–Afghanistan Contact Group* diaktifkan

kembali pada tahun 2017. Langkah ini merupakan respons atas meningkatnya instabilitas di Afghanistan serta kebutuhan akan pendekatan multilateral yang lebih solid.

5. **Trilateral Practical Cooperation Dialogue (2024)**

Dialog trilateral antara Tiongkok, Afghanistan, dan Pakistan membahas kerja sama konkret di bidang infrastruktur, keamanan, dan konektivitas ekonomi sebagai bentuk lanjutan dari diplomasi konstruktif Tiongkok di kawasan.

Dialog ini bertujuan membahas kerja sama praktis dalam berbagai bidang, seperti pembangunan infrastruktur lintas batas, penguatan kapasitas keamanan, dan peningkatan konektivitas ekonomi. Format trilateral ini penting karena mencerminkan komitmen tiga negara dalam membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan bilateral yang sering terjadi antara Afghanistan dan Pakistan.

ANALISIS KEPENTINGAN NASIONAL TIONGKOK

Kepentingan nasional Tiongkok di Afghanistan dapat dikategorikan dalam tiga dimensi utama: *ekonomi, keamanan, dan politik*.

1. **Sektor Ekonomi**

Afghanistan memiliki cadangan mineral strategis seperti tembaga, besi, dan litium yang penting bagi industrialisasi Tiongkok, terutama di sektor energi terbarukan dan teknologi tinggi (Clarke, 2016; Jones & Zeng, 2019). Investasi besar Tiongkok dalam proyek tambang Mes Aynak senilai 3,5 miliar USD merupakan contoh nyata kepentingan ini. Sementara itu dalam bidang infrastruktur merupakan fondasi utama dalam transformasi hubungan ekonomi Tiongkok dengan Afghanistan, terutama dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI) yang berambisi menciptakan konektivitas Eurasia baru yang dipimpin oleh Tiongkok. Strategi ini bukan sekadar investasi pada proyek-proyek fisik seperti jalan, rel, dan jembatan, tetapi juga mencerminkan arsitektur sistem logistik

terintegrasi yang menyatukan dimensi geopolitik, ekonomi, dan teknologi. Afghanistan, sebagai negara yang terkurung daratan dan kaya akan sumber daya, menjadi simpul yang sangat penting dalam jalur perdagangan alternatif yang menghindari Selat Malaka dan Laut Cina Selatan—jalur yang selama ini dianggap rawan intervensi Barat (Clarke, 2016).

Pembangunan infrastruktur dalam kerangka BRI ini memperkuat konektivitas Eurasia dan membuka jalur perdagangan alternatif yang lebih aman dari intervensi Barat.

2. Sektor Keamanan

Kepentingan keamanan Tiongkok berkaitan erat dengan ancaman ekstremisme dan separatisme di wilayah Xinjiang. Instabilitas di Afghanistan berpotensi menjadi sumber penyebaran ideologi radikal. Melalui kerja sama keamanan di SCO dan komunikasi langsung dengan Taliban, Tiongkok berusaha memastikan bahwa Afghanistan tidak menjadi basis bagi kelompok-kelompok ekstremis seperti ETIM (Zhang, 2022).

3. Sektor Politik dan Diplomati

Antara tahun 2016 hingga 2021, Tiongkok memainkan peran diplomati yang semakin penting dalam upaya rekonsiliasi Afghanistan. Berpegang pada prinsip *non-interference*, Tiongkok memilih menjalin komunikasi dengan semua pihak tanpa memaksakan sistem politik tertentu. Pendekatan pragmatis ini menegaskan orientasi Tiongkok pada stabilitas kawasan dan penguatan posisi geopolitik melalui diplomasi pembangunan (*developmental diplomacy*).

KESIMPULAN

Keterlibatan Tiongkok dalam proses perdamaian Afghanistan mencerminkan perpaduan antara kepentingan strategis dan komitmen terhadap stabilitas kawasan. Beijing tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi melalui akses sumber daya dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga berupaya menjaga keamanan regional dan mengurangi potensi ancaman terhadap kepentingan domestiknya.

Untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika ini, penelitian lanjutan perlu mengintegrasikan perspektif lokal Afghanistan, termasuk persepsi masyarakat terhadap intervensi asing serta peran organisasi regional dalam mendukung proses perdamaian. Pendekatan holistik ini akan memperkaya analisis mengenai kontribusi Tiongkok dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan di Afghanistan.

REFERENCES

- Ahrari, M. E. (2000). *China, Pakistan, and "Taliban Syndrome."* *Asian Survey*, 40(4), 658–671.
- Al-Ghiffari, A. A. (2013). *Dinamika Politik Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Taliban 1996–2001*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Anggrein, F., Pahlevi, F. S., & Marsingga, P. (2024). *Upaya Peacemaking United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) dalam Manajemen Konflik Taliban dan Afghanistan. Politics and Humanism*, 3(1), 38–44.
- Anugerah, B., & Purba, J. (2021). *Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya terhadap Geopolitik Global. Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(3), 13–34.
- Argenti, G. (2019). *Taliban dan Afganistan. Banten Tribun*. <https://www.bantentribun.com/bicara/p-r-03943672/taliban-dan-afganistan>
- Brown, E. M. (1996). *The International Dimension of Internal Conflict: CSIA Studies in International Security*. MIT Press.
- Chene, H. (2014). *China in Afghanistan*. Institute of Peace and Conflict Studies.
- Chiu, J., & Ferrie, J. (2016). *Why is China getting involved in Afghan peace talks? The New Humanitarian*. <https://www.thenewhumanitarian.org/a>

- [nalysis/2016/07/04/why-china-getting-involved-afghan-peace-talks](#)
- Desk, W. (2016). *First meeting of Quadrilateral Coordination Group held in Islamabad*. ARY News. <https://arynews.tv/first-meeting-of-quadrilateral-coordination-group-held-in-islamabad/>
- Gartenstein-Ross, D., Trombly, D., & Barr, N. (2014). *China's Post-2014 Role in Afghanistan*. Foundation for Defense of Democracies.
- Hadibroto, I., Alam, S., Suryaputra, E. K., & Widjanarko, E. (2002). *Di Balik Perseteruan AS vs Taliban: Perang Afghanistan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasrat, W., & Nazimi. (2016). *The Taliban and China's quest for Afghan copper*. DW. <https://www.dw.com/en/the-taliban-and-chinas-quest-for-afghan-copper/a-36607748>
- Hong, Z. (2013). *China's Afghan Policy: The Forming of the "March West" Strategy?* *The Journal of East Asian Affairs*, 27(2).
- International Crisis Group. (2021). *Afghanistan: The Future of the Belt and Road Initiative*. International Crisis Group.
- Izzuddin, A., Indrakornawan, R., & Stiarso, H. A. (2022). *Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022*. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(2), 1–19.
- Jackson, R., & Sørensen, G. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Jakobsen, J. (2013). *Neorealism in International Relations – Kenneth Waltz*. *Popular Social Science*, 6.
- Katzman, K. (2010). *Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy*.
- Khalil, A. B. (2017). *The Rise of Taliban Diplomacy*. *The Diplomat*.
- Kuo, M. (2020). *The China–Pakistan Economic Corridor: A New Silk Road?* *Asian Survey*, 60(3), 487–510.
- Maley, W. (1999). *Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan*. Pustaka Al-Kautsar.
- Mas'oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES & Pusat Antar Universitas–Universitas Gadjah Mada.
- Miall, H., Ramsbotham, O., & Woodhouse, T. (1999). *Contemporary Conflict Resolution*. Polity Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mukti, B. M. S., Nasichah, & Lestari, S. W. (2022). *Kemampuan Resolusi Konflik Interpersonal pada Film "Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)"*. *Al-Isyraf: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1), 21–32.*
- Ng, T. P. (2010). *China's Role in Shaping the Future of Afghanistan*. *Carnegie Endowment Policy Outlook*, 1–13.
- Ng, T. P. (2020). *China's Role in Shaping the Future of Afghanistan*.
- Nicholson, M. (1991). *Negotiation, Agreement and Conflict Resolution: The Role of Rational Approaches and Their Criticism*. Sage Publications.
- Pambudi, A. (2022). *Geografi Negara Afghanistan*. *Geografi Regional Dunia*. <https://www.geografi.org/2022/12/geografi-negara-afghanistan.html>
- Piven, B. (2015). *Chinese Company and Taliban Battle Over Afghanistan's Underground Riches*. *Al Jazeera America*, 11.
- Rahimi, A. (2019). *The Role of China in Afghanistan's Economic Development*. *Central Asian Affairs*, 6(2), 123–145.
- Raiszadal, S. (2015). *SCO's Effective Role for Afghanistan Stability*. *The Kabul Times*.
- Safi, M., & Alizada, B. (2020). *Integrating Afghanistan into the Belt and Road Initiative: Review, Analysis and Prospects*.
- Sagena, U. (2013). *Memahami Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional di Selat Malaka: Isu-isu dan Interaksi Antar Aktor*.
- Sharan, T., & Watkins, A. (2021). *Afghanistan Beyond 2021: Inroads for China's*

-
- Regional Ambitions or Security Spillover?*
- Small, A. (2013). *Why is China Talking to the Taliban? Foreign Policy*, 21(2).
- Sudira, I. N. (2017). *Resolusi Konflik dalam Perubahan Dunia. Global: Jurnal Politik Internasional*, 19(2), 156–171.
- Suhardono, W. (2015). *Konflik dan Resolusi. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 2(1), 1–16.
- Syarifuddin, H. (2016). *Islam Modern di Afghanistan. Jurnal Istiqra'*, 4(1), 60–66.
- Tiezzi, S. (2015). *China Hosted Afghan Taliban for Talks: Report. The Diplomat*, 7.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Addison–Wesley Publishing Company.
- Yan, W. (2018). *The Cooperation Between China and Afghanistan Under the “Belt and Road Initiative.”*
- Zhang, Y. (2018). *China's Belt and Road Initiative: A New Model for International Development? Journal of International Affairs*, 71(1), 1–15.